

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI DI DESA PULAU KOMANG KECAMATAN SENTAJO RAYA)

RIZKIE PRATAMA

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi. Jl. Gatot Subroto KM 7. Kebun Nenas. Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi

Pratamarizkie040196@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the Implementation of Kuantan Singingi Regent Regulation Number 57 of 2017 Concerning Village Information Systems in Kuantan Singingi District (Study in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District). The researcher found a problem Based on Article 3 regarding the Function of the Village Information System (SID), the Function of the Village Information System in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District has not been implemented well by the village government. This is due to the absence of an internet network or intranet that supports the operation of the existing Information System in the Village, the absence of a specific application of the Village Information System so that the local community cannot access village data online, Submission of information in Pulau Komang Village District Sentajo Raya still uses the old Information System, namely the delivery of information in the form of CANANG (Information submitted directly by someone appointed directly by the Village Head, whose delivery is directly where the person delivering it goes around the village), as well as information related to public services not yet available. The research method used by researchers is the Qualitative Method with a Descriptive approach, while the Data Collection Methods used are: interviews, observation, and documentation. From the research results of the Implementation of the Kuantan Singingi Regent Regulation Number 57 Year 2017 concerning the Village Information System in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District has not been implemented well.

Keywords : Implementation, Regent Regulation Number 57 Year 2017 Regarding Village Information Systems

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya). Peneliti menemukan adanya permasalahan bahwa Berdasarkan Pasal 3 tentang Fungsi Sistem Informasi Desa (SID), Fungsi Sistem Informasi Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya belum terlaksana dengan baik oleh Pemerintah desa. Hal ini disebabkan lantaran tidak adanya jaringan internet maupun intranet yang mendukung berjalannya Sistem Informasi yang ada di Desa, tidak adanya Aplikasi khusus tentang Sistem Informasi Desa sehingga masyarakat setempat tidak bisa mengakses data-data desa secara online, Penyampaian informasi yang ada di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya masih memakai Sistem Informasi yang lama yaitu penyampaian Informasi dalam bentuk CANANG (Informasi yang disampaikan langsung oleh seseorang yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa, yang penyampaiannya secara langsung dimana orang yang menyampaikannya itu berkeliling kampung), serta Informasi terkait pelayanan publik belum ada. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu Metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif, adapun Metode Pengumpulan Data yang digunakan yaitu: wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya terdapat kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Informasi yang ada didesa sangat penting diketahui oleh masyarakat luas, tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang informasi yang ada didesanya sendiri. Minimnya sosialisasi tentang informasi-informasi yang ada didesa membuat masyarakat kurang mengetahui apa saja yang ada didesa. Begitu juga masyarakat Desa Pulau Komang Sentajo banyak yang tidak mengetahui informasi tentang desanya sendiri. Menyadari akan besarnya manfaat teknologi informasi yang berkembang saat ini maka diperlukannya sebuah sistem baru yang harus diterapkan di Desa pulau komang kecamatan sentajo raya sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengaksesan informasi di Desa Pulau Komang yang masih menggunakan sistem manual. Untuk mempermudah masyarakat maka perlu adanya jalan keluar yang mudah, salah satunya dengan Sistem Informasi Desa (SID).

Dengan adanya sistem informasi desa (SID) di harapkan akan membawa dampak yang cukup baik dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan. Dari sisi pengguna misalnya, seorang pengguna dapat memperoleh informasi setiap saat, tanpa harus di batasi jam kerja pegawai yang ada di kantor desa pulau komang. Pengaksesan informasi yang ada di desa pulau komang akan menjadi lebih mudah, cepat dan akurat. Dengan adanya sistem informasi desa, maka dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas sumber daya yang ada di desa dikarenakan informasi yang lebih mudah diketahui dan di akses oleh masyarakat luas. Sistem informasi desa adalah hal yang terpenting dalam tata kelola pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa mengatur perlunya sistem informasi di tingkat desa pada pasal 86. Dalam bagian ke tiga Undang-undang Desa pasal 86 tentang sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan jelas di sebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Aplikasi tekonologi sistem informasi Desa tentunya berhubungan dengan data-data yang ada di Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang berisi tentang data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor kepala keluarga. Jadi sistem informasi untuk desa adalah sistem yang mengawal banyak hal tentang pelayanan kependudukan salah satu aspeknya adalah keakuratan dan kecepatan dalam pelayanan publik di Desa.

Pengelolaan sistem informasi bertujuan untuk memudahkan berbagai pihak dalam mengakses, memperoleh, dan menyebarkan data-data atau informasi yang bermanfaat. Sehingga dapat di akses oleh orang tertentu, kelompok tertentu, atau dapat diakses oleh siapa saja tergantung dari kebijakan yang telah ditetapkan pengelola. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menerapkan sistem informasi dalam pemerintahannya. Jadi, informasi telah disusun dari pemerintahan tingkat atas hingga desa, dan telah terintegrasi serta dapat di akses oleh jajaran pemerintahan maupun masyarakat. Salah satu bentuk informasi yang diterapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sistem Informasi Desa (SID).

Sistem Informasi Desa (SID) yang awalnya di sebut SIDESA hingga akhirnya berubah menjadi SID, memiliki dua pengertian, Menurut Wilhem (2012:7), Dalam arti sempit SID dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa, guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengola sumber daya yang ada di

komunitas. Cara kerja Sistem Informasi desa (SID) ini adalah hanya dengan membuka situs web desa yang telah dibuat oleh pemerintah desa maka masyarakat akan dapat mengakses apa saja yang berkaitan dengan desa dan mengetahui informasi tentang Desa. Kemudian Sistem Informasi Desa ini juga bisa digunakan sebagai media komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat serta pelayanan administrasi.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, di sebutkan bahwa Fungsi SID antara lain:

- a. Alat untuk mengelola data desa
- b. Media informasi dan komunikasi Pemerintah Desa
- c. Pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa
- d. Pengelolaan informasi sumber daya desa dan kawasan perdesaan.

Pelaksanaan Sistem Informasi desa (SID) tidak hanya memudahkan Pemerintah Desa dalam mencari, menyimpan dan mengelola data desa, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan baru secara berkala, dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa, meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 3 di atas tentang Fungsi Sistem Informasi Desa (SID), Fungsi Sistem Informasi Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya belum terlaksana dengan baik di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya. Hal ini disebabkan lantaran tidak adanya jaringan internet maupun intranet yang mendukung berjalannya Sistem Informasi yang ada di Desa, tidak adanya Aplikasi khusus tentang Sistem Informasi Desa sehingga masyarakat setempat tidak bisa mengakses data-data desa secara online, Penyampaian informasi yang ada di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya masih memakai Sistem Informasi yang lama yaitu penyampaian Informasi dalam bentuk CANANG (Informasi yang disampaikan langsung oleh seseorang yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa, yang penyampaiannya secara langsung dimana orang yang menyampaikannya itu berkeliling kampung), serta Informasi terkait pelayanan publik belum ada.

Melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan adanya Sistem Informasi yang dikelola dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Desa baik itu secara luring maupun daring. Sehingga bermanfaat bagi pemerintah desa, dapat diakses oleh masyarakat/pemangku kepentingan, serta dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa itu sendiri, khususnya di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya).

2. LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Wirman Syafri, 2012:9), administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Faried Ali (2011:19) Secara terminologi Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka

semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dan penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan dinamikanya.

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administratio* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Ilmu administrasi pada dasarnya membicarakan fenomena kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Kita pahami bahwa banyak hal yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin didapat atau diperoleh tanpa bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan atau menggapai cita-cita misalnya, tentu individu memerlukan bantuan dan kerja sama dengan pihak lain.

Menurut E.N Gladden (dalam Wirman Syafri, 2012:9), administrasi adalah “*The first step is to define administration as a general human activity operating, both inside and outside the public sphere throughout the community*”.

“Langkah pertama adalah mendefinisikan administrasi sebagai aktivitas manusia yang bersifat umum yang dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar lingkungan publik, di dalam masyarakat mana pun”.

2.1.2 Teori/Konsep Administrasi Negara

Menurut Nigro (dalam Inu Kencana Syafie 2010:24) administrasi negara adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintah. Administrasi negara mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (dalam Inu Kencana Syafie, 2010: 24), administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Menurut Dimock (dalam Anggara 2012:134). Administrasi Negara adalah bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan dan dikemudikan.

Menurut Juharni (2015:1), administrasi negara (Public Administration) adalah suatu “species” dalam lingkup “genus” administrasi (administration) yang bermakna sebagai kegiatan manusia yang koperatif. Sedangkan Menurut Nigro (dalam Lystianingsi, 2014:3), administrasi negara adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu Yudikatif, Legislatif, Eksekutif, mempunyai suatu peran penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik.

Menurut Rosenbloom, David. H and Kravchuk. Robert S (dalam Pamuji 2014:6). Proses administrasi publik (Negara) terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi tujuan atau keinginan pemerintah. Hal ini tetap berjalan, bagian bisnis pemerintah, berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang dibuat oleh badan legislatif dan pengadilan melalui proses organisasi dan manajemen.

2.1.3 Teori/Konsep Manajemen

Menurut Sarwoto (dalam Zulkifli, 2014:18), mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *Planning, organizing, actuating,* dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2014:17), berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Menurut Wirman Syafri (2012:12), manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh sebab itu manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen. Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2010:49), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang tertentu.

Secara etimologi, *management* (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata *manus* (tangan) dan *agere* (melakukan), yang setelah digabung menjadi kata *manage* (bahasa Inggris) berarti mengurus atau *managiere* (bahasa Latin) yang berarti melatih. Menurut Frederick W. Taylor (dalam Inu Kencana Syafiie, 2010:48), *The art of management, is defined as knowing exactly what you want to do, and then seeing that they do it in the best and cheapest way*. Maksudnya ilmu manajemen itu dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah atau tidak.

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2010:49), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang tertentu. Sedangkan Menurut George Terry (2010:49), manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang lainnya.

Menurut Dian Ari Nugroho (2017:2), manajemen merupakan proses pencapaian tujuan yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar kegiatan tersebut berjalan efektif dan efisien.

Menurut Follet (dalam Kadarisman, 2018:4), pengertian manajemen adalah sebagai suatu seni yang tiap-tiap pekerjaan dapat diselesaikan melalui orang lain. Defenisi ini dapat tunjukkan dari seseorang yang harus mampu mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2.1.4 Teori/Konsep Organisasi

Menurut Luther Gulick (dalam Inu Kencana Syafiir, 2010:52), organisasi adalah sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Defenisi organisasi menurut pendekatan proses antara lain tergambar dalam pendapat Messie (dalam Zulkifli, 2014:78), yaitu organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Menurut Soffer (dalam Zulkifli, 2014:78), juga diikuti dengan tindakan pendistribusian peranan kepada setiap anggota untuk melaksanakan rincian tugas tertentu dalam rangka upaya menghasilkan beberapa bentuk produk. Organisasi juga dapat diartikan sebagai wadah mempersatukan berbagai keahlian dan karakteristik anggota untuk mencapai tujuan organisasi.

Sebagian sarjana dan pakar mengartikan organisasi (*organization*) semata-mata hanya sebagai alat bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan. Defenisi seperti ini antara lain dirumuskan oleh Jones (dalam Zulkifli, 2014:78), *organization is tool used by people individually in groups to accomplish a wide variety of goals*. Defenisi organisasi dalam arti luas tentulah tidak sesederhana itu. Sebagai locus dan fokus studi ilmu administrasi, organisasi dapat dijabarkan dari banyak aspek sumber daya serta faktor

lingkungan yang melingkupinya. Kajian dari multi aspek tersebut melatarbelakangi beragam defenisi organisasi yang telah ditulis oleh para sarjana dan pakar. Terutama mereka yang memandang oerorganisasi sebagai sistem, yaitu menilai adanya keterkaitan antara dinamika organisasi dengan berbagai unsur yang melingkupinya.

Huse dan Bouditch (dalam Zulkifli, 2014:79), mengemukakan empat batasan organisasi, Empat batasan itu secara umum menjelaskan bahwa organisasi sebagai satu sistem terdiri dari beberapa subsistem yang saling tergantung satu sama lainnya. Organisasi harus pula dipandang sebagai satu subsistem dari sistem lingkungan yang lebih luas. Dia harus berinteraksi terhadap perubahan-perubahan aspek lingkungan tersebut. Organisasi itu bersifat terbuka dan dinamis, merupakan suatu proses terdiri dari masukan, keluaran, transformasi, umpan balik, maka organisasi selalu berupaya menjaga keseimbangan dalam setiap aktivitasnya. Organisasi juga memiliki atau terdiri dari sejumlah fungsi dan tujuan, yang beberapa diantaranya cenderung berada dalam situasi konflik, dan adalah tugas para administrator untuk selalu menjaga dan mempertahankan keseimbangan diantaranya.

2.1.5 Teori/Konsep Otonomi Daerah

Menurut Simanjuntak (2013:70), otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat otonomi daerah adalah upaya memperdaya daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Perubahan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada pasal 1 poin 6 disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Simanjuntak (2013:70), mendefenisikan otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan peundang-undang.

2.1.6 Teori/Konsep Pemerintah Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat (3), bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa.

Menurut Wasistiono & Tahir (dalam Rauf & Maulidiah, 2015:21), bahwa pemerintah desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat lebih banyak.

Menurut Rauf & Maulidiah (2015:19), mengatakan desa di indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintah desa, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian tentang Pemerintah Desa dinyatakan, yakni: “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Menurut pasal 25 Undang-undang Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

2.1.7 Teori/Konsep Implementasi

Menurut Grindle (dalam Deddy Mulyadi 2016:47), implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Menurut Agustino (2010:139), implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimanapelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Gordon (dalam Deddy Mulyadi 2016:24), implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Van meter Horn (dalam Agus Purwanto 2012:20), mendefenisikan implementasi secara spesifik yaitu : “those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in the prior policy decisions”. Maksudnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan agar tetap tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses kebijakan. Menurut Gordon (dalam Deddy Mulyadi 2016:24), implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Sedangkan menurut Jones (dalam Deddy Mulyadi 2016:45), implementasi adalah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Kemudian Menurut Van Horn dan Van Meter (dalam Deddy Mulyadi:2016:45), implementasi adalah “*Those actions by publik and private individual (or groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy* (tindakan yang dilakukan pemerintah).

2.1.8 Teori/Konsep Sistem Informasi Manajemen

Menurut Robert (dalam Tata Sutabri, 2005:91), Sistem Informasi Manajemen adalah proses komunikasi dimana informasi masukan (input) direkam, disimpan dan diproses untuk menghasilkan output yang berupa keputusan tentang perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan. Sedangkan menurut Joseph (dalam Tata Sutabri, 2005:91), Sistem Informasi Manajemen adalah perpaduan sumber daya manusia dan sumber daya yang berbasis komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien serta perencanaan bisnis.

Menurut Tata Sutabri (2005:9), pada umumnya apabila orang membicarakan sistem informasi manajemen, yang tergambar adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. pemanfaatan data disini berarti penunjang pada tugas-tugas rutin, evaluasi terhadap prestasi organisasi atau untuk pengambilan keputusan oleh organisasi. Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah bentuk sistem informasi yang ditujukan untuk melayani para manajer.

Kemudian menurut Soetdjo (dalam Tata Sutabri, 2005:91), Sistem Informasi Manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi didalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan.

2.1.9 Teori/Konsep Kebijakan

Menurut Titmuss (dalam Suharto, 2010:7), mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss senantiasa berorientasi pada masalah dan berorientasi kepada tindakan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat

prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dye (dalam Abidin, 2012:5), menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan Ealau dan Prewit (dalam Suharto, 2010:7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya.

Menurut Agustino (2012:7), kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Menurut Husaini Usman (2014:129), kata Deskriptif berasal dari bahasa inggris, descriptive, yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Sedangkan menurut Arikunto (2010:278), kualitatif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dan hasil wawancara.

3.2 Informan

Menurut Burgin (2007:76), informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Penelitian ini mengandalkan informasi dari narasumber yang kemudian disebut informan penelitian. Informan dalam penelitian ini di tentukan dengan teknik purposive sampling yang berarti bahwa informan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi untuk memberikan informasi terkait dengan data-data penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 23 informan.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2014:131), data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2014:131), data sekunder adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya).

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di desa pulau

komang kecamatan sentajo raya karena peneliti menemukan masalah terutama tentang Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa yang belum di implementasikan didesa pulau komang sentajo kecamatan sentajo raya.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Metode Wawancara (*interview*)

Menurut Sugiyono (2017:157), Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

3.6.2 Metode Obsevasi

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2017:166), mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sugiyono menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momuntal dari seseorang.

3.6.4 Triangulasi

Menurut Sugiyono (2009:241), dalam teknik pengumpulan data Triangulasi diartikan sebagai teknik pegumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pegumpulan data dan sumber data yang telah ada.

3.7 Metode Analisa Data

3.7.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh di tulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang di susun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

3.7.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lainnya.

3.7.3 Penyimpulan data dan Verifikasi

Kegiatan menyimpulkan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi disajikan secara sistematis dan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara penulis dengan 23 informan dapat di ketahui bahwasannya bahwa Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya belum terlaksana dengan baik. Menurut analisa dan pengamatan yang telah di lakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Alat untuk mengelola data desa, bahwa alat yang di gunakan dalam mengelola data desa seperti komputer dan jaringan internet masih belum di katakan memadai. Lantaran karena tidak adanya jaringan internet di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo

Raya. Jaringan internet telah diputus oleh Pemerintah Desa karena dengan alasan biayanya yang terlalu mahal. Dengan tidak adanya jaringan internet di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya, tentunya Sistem Informasi tidak bisa berjalan secara online, terutama dalam mengelola data-data masyarakat, bahkan dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat juga tidak bisa lebih cepat dan efisien.

Sistem Informasi Desa tidak terlaksana dengan baik di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya, karena jaringan internet yang tidak ada. Sistem Informasi yang di terapkan di Desa Pulau Komang masih memakai sistem informasi yang lama yaitu masih melakukan pendataan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara manual serta penyampaian informasi masih dari mulut ke mulut yang tentunya ada sebagian dari masyarakat yang terlambat dalam mendapatkan informasi. Pemerintah telah mewajibkan untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem Informasi Desa harus di kembangkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Desa, Pelaksanaannya bisa menggunakan APBD, APBN, ataupun APBDes.

Dengan adanya Sistem Informasi Desa maka akan memudahkan pemerintah Desa dalam mengelola data-data desa, Pemerintah Desa akan lebih cepat saat mencari data penduduk tidak perlu membolak balik untuk membuka kartu keluarga. Kemudian pemberian pelayanan juga akan lebih cepat, seperti dalam pelayanan pembuatan surat menyurat yang penyelesaiannya lebih cepat karena hanya perlu mencari nama penduduk lalu aplikasi SID akan bekerja untuk membuat surat yang di perlukan. Kemudian pemerintah Desa juga bisa lebih transparan kepada masyarakat mengenai anggaran dana desa serta masyarakat bisa lebih mudah mengeluarkan pendapatnya kepada pemerintah desa.

Kemudian mengenai indikator Media Informasi dan Komunikasi Pemerintah Desa, bahwa media informasi dan komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi-informasi penting kepada masyarakat serta masyarakat bisa dengan mudah memberikan pendapatnya kepada pemerintah desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan desa. Pemerintah desa pulau komang kecamatan sentajo raya dalam memberikan informasi masih belum menggunakan Sistem Informasi Desa yang berbasis web yang telah di wajibkan oleh pemerintah. Pemerintah desa menyampaikan informasi dan komunikasi yaitu dengan menyampaikannya langsung kepada masyarakat. Sistem informasi yang di gunakan oleh desa pulau komang masih memakai sistem yang lama, yang tentunya informasi yang di sampaikan itu belum semuanya merata dapat di ketahui langsung oleh masyarakat karena masih ada sebagian masyarakat yang terlambat bahkan tidak mendapatkan informasi yang telah di berikan oleh pemerintah desa.

Pemerintah Desa Pulau Komang seharusnya sudah mengimplementasikan Sistem Informasi Desa yang berbasis Web, sesuai dengan peraturan Bupati yang telah di tetapkan. Dengan menggunakan Sistem Informasi Desa akan lebih memudahkan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat serta masyarakat akan lebih mudah dalam mengetahui informasi yang diberikan. Dengan SID, seperti informasi kependudukan, perencanaan, asset, anggaran dan sebagainya akan terekam secara elektronik. Semua informasi tersebut mempunyai potensi untuk lebih mudah di akses oleh masyarakat, karena kantor desa mempunyai kesempatan untuk menyediakan fasilitas bagi warga untuk mengakses informasi desa dengan mudah, misalnya dengan menerbitkan informasi desa di web desa.

Kemudian mengenai indikator Pelayanan administrasi dan Pengelolaan keuangan desa, bahwa Sistem Informasi Desa yang berbasis web belum di terapkan oleh pemerintah desa pulau komang kecamatan sentajo raya kemudian Pelayanan administrasi dan Pengelolaan keuangan desa masih belum sesuai harapan masyarakat, Karena menurut masyarakat pelayanan administrasi yang di berikan oleh pemerintah desa masih di lakukan secara manual

terutama dalam pembuatan surat menyurat, dimana hal ini berdampak terhadap pelayanan yang kurang maksimal terhadap masyarakat. Penggunaan aplikasi microsoft office dalam pembuatan surat memiliki beberapa kelemahan seperti format surat yang berubah-ubah serta rawan terhadap keakuratan pencatatan data surat yang telah di buat.

Kemudian dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa pulau komang masih mengelola keuangan secara manual yang tentunya pengelolaan keuangan desa akan lambat, tidak akurat, serta tidak dapat di ketahui secara rinci oleh semua masyarakat. Pemerintah desa tidak mengimplementasikan Sistem Informasi Desa yang berbasis web untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan keuangan desa, padahal sistem informasi desa berbasis web sudah di tetapkan untuk di implementasikan oleh pemerintah desa supaya pemerintah desa bisa lebih mudah dalam memberikan pelayanan, informasi, pengelolaan keuangan desa, serta bisa lebih mudah untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

Kemudian mengenai Indikator Pengelolaan Informasi sumber daya desa dan kawasan perdesaan, bahwa Sistem Informasi Desa belum di dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan informasi sumber daya desa dan kawasan perdesaan. Pemerintah desa belum memanfaatkan sistem informasi desa yang telah di amanatkan oleh Undang-undang desa. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan penerapan Sistem Informasi Desa, sebuah sistem yang memungkinkan desa untuk melaporkan kegiatan dan anggarannya ke publik. Sistem informasi desa ini memungkinkan bagi desa untuk memiliki kemandirian data. Kemandirian data tersebut dapat di gunakan untuk mengelola sumber daya desa itu sendiri.

Kemudian Sistem Informasi Desa juga memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk bisa mempromosikan potensi desanya. Sistem informasi desa juga bisa di gunakan sebagai sistem keamanan desa-desa yang rentan bencana, melalui jejaring informasi desa siaga bencana. Dengan sistem informasi desa masyarakat dapat mengerti mengenai peningkatan pelayanan, promosi potensi desa, keakuratan data, pengelolaan data, perencanaan dan pembangunan yang lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Kemudian banyak tanggapan masyarakat mengenai sistem informasi desa pulau komang kecamatan sentajo raya, supaya pemerintah desa menerapkan sistem informasi yang berbasis web supaya bisa memudahkan pemerintah desa maupun masyarakat dalam mengelola sumber daya desa serta kawasan perdesaan. Sistem informasi desa tidak sekedar sebagai media untuk menyebarluaskan informasi dari desa tapi juga mendorong tumbuhnya para pelaku ekonomi dan pemasaran produk unggulan di desa.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya) dapat di ketahui bahwa belum terlaksana dengan baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Desriadi, S.Sos.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan selaku pembimbing.

4. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Rika ramadhanti, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. Suirman selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, saran serta motivasi kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai
8. Orang tua Penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta serta keluarga yang telah banyak memberikan bantuan serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

REFERENSI

- Ari, Dian Nugroho. 2017. *Pengantar Manajemen*. Penerbit UB Press
- Ali, Farid. 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*. Penerbit : Rajawali Pers
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit CV Pustaka
- Agustiono, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit CV Pustaka.
- Daryanto. 2011. *Administrasi Pendidikan*. Rineka Cipta Jakarta
- Dwijowijoto. Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hasibuan, Melayu. 2011. *Organisai dan Motivasi Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, S.P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara
- Hasibuan. Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hasibuan, Melayu. 2010. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. PT Bumi Aksara. Jakart
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Penerbit Riant Nugroho
- Juharni. 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. CV SAH MEDIA
- Kedua Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi)*.
- Kencana, Inu Syafiie. *Ilmu Administrasi Publik*. 2010. Reneka Cipta. Jakarta
- Kedua Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi)*.
- Kencana, Inu Syafiie. *Ilmu Administrasi Publik*. 2010. Reneka Cipta. Jakarta
- Lystia ningsih. 2014. *Adminitrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Grahailmu
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Pedoman Penyusunan Tugas Akhir. 2017. Universitas Islam Kuantan Singingi
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabet. Bandung
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Administrasi Publik*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabet. Bandung
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Administrasi Publik*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Siagian, Sondang. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, CV
- Usman, Husaini. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wilhem. 2012. *Sistem Informasi Desa Mengola Sumber Daya Lokal untuk kemandirian Desa*. Yogyakarta : Combine Resource Institution
- Zulkfli. 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru

